

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam perwujudan program kinerja yang telah direncanakan oleh OPD tersebut. Setiap program dan kinerja memiliki batas anggaran yang disepakati dalam 1 (satu) tahun anggaran yang direncanakan.
2. DPRD Sumatera Barat sebagai organisasi pemerintahan daerah memiliki kewajiban dalam penyusunan anggaran untuk mencapai pemaksimalan pendapatan daerah dan realisasi belanja yang terorganisir. Dalam proses penelitian yang telah dilakukan penulis, DPRD Sumatera Barat telah memprioritaskan kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk dianggarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. DPRD memiliki kegiatan yang berbeda dengan organisasi pemerintah daerah lainnya dikarenakan didalamnya terdapat pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang memiliki tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk mensejahterakan rakyatnya sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

4. Hasil penentuan klasifikasi anggaran terhadap rencana kinerja DPRD terdapat pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) DPRD Sumatera Barat yang dimana menjadi acuan realisasi kinerja anggaran DPRD Sumbar untuk tahun yan dianggarkan.
5. DPRD telah melaksanakan penyusunan anggaran sesuai dengan SOP

5.2 Saran

Dari bab-bab sebelumnya diatas dan kesimpulan diatas penulis dapat menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebagai organisasi pemerintah daerah DPRD seharusnya memiliki capaian kinerja yang berdasarkan prioritas dan bertujuan menunjang pembangunan daerah.
2. Setelah mendapatkan program kinerja DPRD memiliki kewajiban dalam memaksimalan efisiensi anggaran demi tercapainya anggaran pendapatan dan belanja yang realistis.
3. Sebagaimana dijelaskan pada sebelumnya, organisasi pemerintah daerah DPRD sumbar memiliki pimpinan dan anggota DPRD didalamnya yang diharapkan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan tetap menampung aspirasi masyarakat sehingga anggaran yang disusun tetap memiliki prioritas kebutuhan rakyat khususnya rakyat Sumatera Barat.